Kasus Lahan Zikir ke Jaksa

BANDA ACEH - Satreskrim Polresta Banda Aceh melimpahkan berkas perkara tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan zikir Nurul Arafah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Reskrim, Kompol Fadillah Aditya Pratama, mengatakan, berkas tersangka itu adalah DA (53) mantan Keuchik Gampong Ulee Lheue, SH Kasi Pemerintahan Gampong Ulee Lheue dan MY.

Pelimpahan berkas perkara ke Jaksa itu dilakukan pada Jumat (15/12/2023). Di mana berkas perkara ketiga tersangka dianggap lengkap untuk diserahkan ke Jaksa. "Saat ini berkas semua tersangka saat ini sudah kami limpahkan kembali ke JPU," kata Fadillah saat dikonfirmasi, Selasa (19/12/2023).

Dikatakan, pihaknya saat ini tinggal menunggu hasil penelitian dari JPU untuk dapat segera P21. Jika sudah P21 makan akan masuk Tahap II yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti (BB) ke Jaksa. "Kalau sudah P21, tersangka dan BB sudah jadi kewenangan JPU untuk dilakukan penahanan kembali," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, masa penahanan dua tersangka korupsi pengadaan lahan zikir Nurul Arafah Islamic Center yang berada di Gampong Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sudah habis, Selasa (31/10/2023).

Dua tersangka yang dimaksud yakni DA (53) selaku eks Keuchik Gampong Ulee Lheue dan SH selaku Kasi Pemerintahan Gampong Ulee Lheue yang masih aktif. Keduanya ditahan selama 120 hari sejak tanggal 4 Juli 2023 hingga 31 Oktober 2023, sembari penyidik merampungkan berkas perkaranya untuk dapat disidangkan.

Meski masa tahanannya habis, polisi masih terus melanjutkan perkara yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1 miliar (berdasarkan hasil audit BPKP) ini. Masa penahanan habis juga terjadii ke MY.

MY sudah ditahan selama 120 hari sejak tanggal Agustus hingga 5 Desember 2023, sembari penyidik merampungkan berkas perkaranya untuk dapat disidangkan.

Meski masa tahanannya habis, polisi masih terus melanjutkan perkara yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1 miliar (berdasarkan hasil audit BPKP) ini.**(iw)**

HUMAS DPRK BANDA ACEH

BERI SANTUNAN - Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar memberikan santunan anak yatim pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Sanggar Cit Ka Geunta, Minggu (17/12/2023).

Farid Santuni Anak Yatim pada Maulid Sanggar Cit Ka Geunta

BANDA ACEH - Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar memberikan santunan anak yatim kepada anak-anak warga Gampong Beurawe dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Sanggar Cit Ka Geunta, Minggu (17/12/2023).

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan penyerahan santunan kepada anak yatim ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H. Menurutnya santunan ini sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kepada sesama, apalagi santunan kepada anak yatim yang memang merupakan anjuran Rasulullah SAW.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berharap santunan tersebut dapat sedikit meringankan anak-anak yatim yang ada di Gampong Beurawe.

"Kalau dilihat dari nominalnya mungkin tidak seberapa, tapi mohon dimanfaatkan yang sebaik-baiknya oleh adek-adek semua, semoga memberikan keberkahan bagi kita semua," kata Farid Nyak Umar.

Sementara Ketua Sanggar Cit Kageunta, Muhammad Alkautsar menyampaikan santunan anak yatim ini merupakan agenda rutin sanggar Cit Kageunta yang dilakukan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sejak tahun 2018 lalu hingga saat ini.

"Kami dari anggota sanggar berusaha untuk membantu adik-adik semua, alhamdulillah santunan ini dibantu oleh guru kami, Ustadz Farid Nyak Umar," kata Dek Mat sapaan akrab Alkautsar.

Kautsar menambahkan santunan diberikan kepada para anak yatim yang ada di Gampong Beurawe yang dibina oleh Tgk H Adnan Ali.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Keuchik Gampong Beurawe, Amri, Dewan Pembina Sanggar, Tarimin, Perangkat Gampong Beurawe, orang tua dan anggota Sanggar Cit Ka Geunta.**(mas/*)**

90 Gampong Deklarasikan Bebas BABS

JANTHO - Sebanyak 90 Gampong di Aceh Besar sudah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS), Selasa (19/12/2023).

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Anita, mengatakan, saat ini sudah ada empat kecamatan di kabupaten itu mendeklarasikan ODF.

Ia berharap deklarasi gampong ODF ini bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat di Kecamatan Lhoknga.

"Karena tujuan dari deklarasi ODF itu untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap perilaku hidup sehat, apalagi terkait buang air besar di sembarang tempat," kata Anita.

Ia menyebutkan, di Aceh Besar pada tahun 2012 masih fokus pada satu pilar yaitu stop buang air besar di sembarang tempat. Namun dengan adanya peraturan Bupati (Perbup) No. 19 tahun 2013 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Untuk diketahui hingga saat ini ada 372 gampong yang sudah terverifikasi ODF di Aceh Besar, 40 Gampong yang mengklaim ODF dan 90 Gampong yang sudah mendeklarasi ODF. Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, mengatakan, kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah, Deklarasi ODF ini merupakan perwujudan dari perilaku hidup sehat.

"Kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah termasuk Gampong juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan dan kesehatan," katanya usai deklarasi ODF di Kantor Camat Lhoknga, Aceh Besar, Senin (18/12/2023).

Dia mengatakan, faktor kesehatan tidak terlepas dari perilaku hidup sehat masyarakat, diantaranya dengan mendeklarasikan diri bahwa masyarakat kecamatan Lhoknga akan menjaga kesehatan dengan tidak buang air besar sembarangan. **(iw)**

Kasus Difteri di Aceh Meningkat

DIFTERI, penyakit menular yang disebabkan oleh corynebacterium diphteriae masih menjadi momok menakutkan di masyarakat. Penyakit yang bisa menyerang orang-orang dari segala usia ini tersebar melalui batuk, bersin, atau luka terbuka. Bahkan, infeksi serius dengan komplikasi dapat mengancam jiwa, terutama anak-anak.

Di Provinsi Aceh, kasus difteri meningkat secara signifikan. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 17 kasus dan tahun 2022 naik menjadi 30 kasus, kini hingga November 2023 sudah terdapat 33 kasus difteri di Aceh. Sayangnya, rata-rata sekitar 10 persen dari jumlah pasien yang dirawat tersebut tak bisa diselamatkan.

Demikian diungkapkan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Aceh, dr Iman Murahman MKM saat diwawancarai pada Rabu (13/12/2023).

Menurut Iman, kasus difteri yang didominasi anak-anak ini kini semakin meningkat dan merata di kabupaten/kota.

Rata-rata, anak yang terserang difteri dari usia 1-4 tahun, 5-9 tahun, dan 10-14 tahun. Penyakit ini memiliki gejala awal meliputi demam atau tanpa demam, infeksi di tenggorokan, adanya kemerahan di faring, leher membengkak, hingga terdapat selaput putih keabuan yang bisa menutup setengah rongga tenggorokan.

Disebutkan, sejumlah upaya sudah dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh untuk mencegah difteri, di antaranya dengan melakukan imunisasi ke sekolah-sekolah, namun sebagian besar menolak imunisasi.

"Setiap tahun ada kasus difteri yang meninggal di Aceh, dan kenaikan kasusnya signifikan. Sekitar 10 persen dari jumlah kasus difteri itu meninggal. Imunisasi adalah cara pencegahan yang mungkin dilakukan," ujar dr Iman Murahman MKM.

Iman melanjutkan, terkadang penolakan terhadap imunisasi ini tak beralasan. Ada orang tua yang masih mempertanyakan kehalalan vaksin, namun sebagian besar menolak imunisasi karena takut efek sampingnya. "Seperti demam setelah disuntik, dan bengkak di tempat suntikan. Padahal ini tidak yang lumrah terjadi. Ini tidak membahayakan," jelasnya.

Sekitar 10 persen dari jumlah kasus difteri itu meninggal. Imunisasi adalah cara pencegahan yang mungkin dilakukan.

IMAN MURAHMAN
Kabid P2P Dinkes Aceh

Ditambahkan, Dinkes Aceh selama ini telah melakukan deteksi dini. Terhadap yang terjangkit difteri diberikan anti difteri serum (ADS), antibiotik, konsul ke Dokter Spesialis Anak, THT, dan Jantung. "Pasien tersebut biasanya dirawat di ruang terpisah di rumah sakit, agar tidak menular ke yang lainnya," kata dia.

Sementara terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien harus diperiksa dengan mengambil swab tenggorokan lalu dikirim ke laboratorium Jakarta. Orang terdekat dengan pasien juga harus diberikan antibiotik dan mendapat imunisasi dengan 3 dosis. "Inilah yang menjadi tantangan, karena imunisasi itu ditolak masyarakat," sambung Iman.

Iman Murahman menjelaskan, fase paling berbahaya bagi pasien difteri ialah saat timbul selaput putih keabuan yang menutup saluran napas. Dokter bisa menciptakan saluran napas buatan di leher pasien yang menembus trakea, namun ada komplikasi serius yang bisa timbul. "Kalau pun pasien bisa bertahan, di fase ini, bisa komplikasi dengan infeksi pembungkus jantung, gagal fungsi ginjal, dan kejang otot. Jadi ini sangat melelahkan," timpalnya.

Capaian imunisasi terendah sedunia

Pada bagian lain, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Aceh, dr Iman Murahman MKM mengungkap fakta mencengangkan terkait imunisasi di Aceh. Menurutnya, saat ini capaian imunisasi di Aceh terendah sedunia.

"Tidak ada negara yang tidak melaksanakan imunisasi. Namun di Aceh, capaian imunisasi kita terendah di Indonesia bahkan dunia," akunya.

Tanpa imunisasi, sambungnya, anak-anak akan rentan terjangkit penyakit menular yang mematikan seperti difteri. "Sebenarnya kita tinggal imunisasi aja, selesai masalahnya. Jangan sampai anak kita harus melalui masa kritis ini," ujarnya.

Iman Murahman berpesan, kepada para orang tua yang menemukan gejala seperti difteri pada anaknya, agar segera membawa si buah hati ke dokter dengan memakai masker.**(*)**

GEJALA AWAL DIFTERI

- Demam dan menggigil
- Nyeri tenggorokan
- Leher membengkak
- Lemas dan lelah
- Sulit bernapas
- Ada selaput putih keabuan yang menutupi tenggorokan

DOK HUMAS PEMERINTAH ACEH

TINJAU VAKSINASI - Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Marzuki meninjau kegiatan Bakti sosial pelayanan kesehatan bergerak daerah terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK) sekaligus meneteskan vaksin polio ke mulut anak-anak di Gampong Saney, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Senin (26/12/2022).

PKK Aceh Ajak Semua Pihak Kampanyekan Imunisasi Difteri

SELAIN campak, penyakit difteri juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di Aceh. Banyaknya temuan kasus penyakit akibat wabah difteri ini bahkan membuat Aceh pada awal 2023 masuk dalam daftar daerah berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus difteri.

Untuk diketahui, difteri merupakan penyakit menular yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta dapat memengaruhi kulit. Penularannya bisa melalui batuk, bersin, atau luka-luka terbuka.

Difteri tidak hanya menjangkiti anak-anak saja, tetapi juga bisa menyerang orang-orang dewasa. Disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae, orang yang terjangkit ini bisa berisiko mengalami infeksi serius, komplikasi dan berpotensi mengancam nyawa.

Oleh sebab itu, penyakit difteri tergolong penyakit iyang bisa berakibat fatal yang membutuhkan penanganan segera. Satu-satunya pencegahan difteri yang paling efektif adalah mendapatkan vaksinasi difteri.

Di Indonesia, vaksin difteri adalah salah satu vaksinasi wajib yang diberikan untuk balita ketika melakukan imunisasi. Namun sayang, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi masih rendah.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga April 2023, belum ada provinsi yang mampu mencapai target pemberian imunisasi lengkap untuk bayi berusia 0-11 bulan untuk trimester pertama. Bahkan, ada lima provinsi yang capaiannya masih di bawah 1 persen dari target nasional 33,3 persen. Salah satunya Provinsi Aceh.

Ayu Marzuki, Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh yang juga ikut membantu Pemerintah Aceh dalam hal penanganan masalah kesehatan mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat angka imunisasi masyarakat Aceh menjadi rendah.

Dari sejumlah pengalamannya terjun ke daerah, menurut dia, alasan rendahnya imunisasi di Aceh tidak lain karena kesadaran dari masyarakat yang masih rendah.

"Banyak sekali (penyebabnya). Isu haram kemudian dilarang suami," ujarnya yang ditemui seusai acara peluncuran sekolah pranikah yang digagas oleh timnya di Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (9/12/2023).

Selain itu, faktor reaksi usai mendapat imunisasi juga menjadi alasan masyarakat enggan membawa anaknya untuk mendapatkan vaksinasi. Oleh sebab itu, persoalan imunisasi ini menurutnya merupakan PR berat dan besar.

Bukan hanya dari tim kesehatan saja, tapi dibutuhkan semua pihak untuk bisa mengampanyekan imunisasi pada anak untuk mencegah risiko penyakit yang tidak diinginkan, termasuk difteri.

"Edukasinya tidak hanya dari tim kesehatan, tapi juga harusnya dari pihak sekolah," ujar Ayu.

Tim PKK Aceh sendiri, lanjut Ayu, dalam aksinya di daerah juga meminta pihak sekolah untuk bisa bekerja sama dalam penanganan masalah kesehatan ini. Seperti melakukan pendekatan yang lebih dengan orang tua wali murid untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya imunisasi.**(*)**